

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 □ Latar Belakang

Pada era globalisasi ini perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya (I Putu & Ayu, 2020). Akuntansi dan pelaporan keuangan suatu unit pemerintahan, menyajikan informasi keuangan yang berguna untuk membuat keputusan ekonomi, politik dan sosial. Pemakai informasi keuangan unit pemerintah adalah pemerintah, investor dan kreditor, masyarakat, pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Informasi keuangan yang dibutuhkan adalah informasi mengenai apakah operasi keuangan dijalankan dengan baik, apakah pelaporan keuangan dari suatu audit entitas disajikan secara wajar dan apakah entitas tersebut telah mentaati hukum dan peraturan yang ada, dan untuk melihat akuntabilitas secara riil, menilai integritas, kinerja dan pertanggungjawaban aktivitas pemerintah. Guna memenuhi kebutuhan para pemakai tersebut, informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan perlu diaudit, hal tersebut dijalankan oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan untuk mencapai kualitas audit yang baik (Umar et al., 2018).

Kinerja suatu organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian hasil tertentu, harus sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas yang harus dipertanggungjawabkan (Mahsun, 2016:4). Pengukuran kinerja sektor publik untuk memenuhi tiga maksud yaitu untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan serta untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2018:151-152). Pemerintah dikatakan memiliki kinerja baik ketika pemerintah terkait dapat mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh, karena organisasi pemerintah bukan entitas bisnis yang mencari laba (Mardiasmo, 2009:166). Kinerja instansi pemerintah berkaitan erat dengan pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi.

Memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat.

Pengawasan ialah proses pemantauan, pengecekan, serta penilaian yang dilakukan secara berdaya guna oleh pimpinan organisasi terhadap sumber-sumber kerja buat mengenali kelemahan ataupun kekurangannya supaya bisa diperbaiki oleh pimpinan yang berwenang pada jenjang yang lebih tinggi demi tercapainya tujuan yang sebelumnya sudah diformulasikan (Lukas et al., 2017). Menurut Siregar (2017:63) pengawasan merupakan proses untuk membenarkan bahwasanya aktivitas yang direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik. Sedangkan menurut Setyawan & Safri (2016) Pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara berjenjang yang awal diawali dari atasan langsung (kepala SKPD) yang melaksanakan pengawasan melekat terhadap kinerja dari tiap personel/staf sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam mengelola keuangan daerah. Pengawasan yang kedua dilakukan oleh pengawas intern serta pengawas ekstern, serta pengawasan yang ketiga dicoba oleh lembaga legislatif (DPRD) dalam kapasitasnya melaksanakan guna kontrol terhadap kinerja pemerintah wilayah. Ketiga komponen pengawasan tersebut menjadi sesuatu kebutuhan untuk pemerintah wilayah untuk menggapai *good governance* khususnya dalam perihal pengelolaan keuangan wilayah sehingga bisa dilaksanakan secara transparan, murah, efisien, efektif, responsif serta *accountable*.

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi sektor publik dalam mencapai tujuannya (Bastian, 2010:88). Selain akuntabilitas diperlukan juga transparansi dalam kinerja pemerintah. Selain itu tuntutan sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan informasi terhadap masyarakat dalam rangka memenuhi hak-hak publik dalam hal-hal nya pengelolaan anggaran. Transparansi dapat diartikan memberikan informasi yang terbuka, yang sesuai dan jujur kepada publik sesuai dengan perundang-undangan (Halim, 2016:56).

Transparansi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Permasalahan yang berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah adalah buruknya kinerja pelayanan publik. Keluhan masyarakat beberapa tahun terakhir yang berkaitan dengan penyimpangan penyelenggaraan pelayanan publik yang menduduki peringkat pertama masih keluhan mengenai kinerja pemerintah daerah.

Akutabilitas Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tahun 2018 mendapat opini secara Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dari hasil pemeriksaan tersebut juga menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi masih terdapat beberapa kelemahan yang berkaitan dengan SPI (Sistem Pengendalian Intern).

Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran (TA) 2018 mengungkapkan sebanyak tujuh temuan pemeriksaan, diantaranya yaitu penatausahaan kas daerah pemerintah kota Bekasi belum tertib, Pemerintah Kota Bekasi menyajikan saldo kas dan setara kas sebesar Rp99.502.538.249,00 dalam Neraca *audited* per 31 Desember 2018 Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bekasi TA 2016 No: 35B/LHP/XVIII.BDG/05/2018 tanggal 23 Mei 2018 diungkapkan bahwa terdapat permasalahan terkait adanya selisih pencatatan antara Bidang Perbendaharaan dengan pihak Bank.

Penerapan akuntabilitas pada Pemerintahan Kota Bekasi masih belum efektif dikarenakan masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

- 1) Proses penetapan Pajak Bumi dan Bangunan belum sesuai ketentuan serta pendataan dan validasi data piutang belum optimal.
- 2) Pengelolaan dan penatausahaan persediaan belum dilaksanakan secara memadai.

- 3) Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum dilaksanakan secara memadai.
- 4) Realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp43.771.200.000,00 tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban dan tanda terima.
- 5) Pengelolaan pendapatan hibah *Corporate Social Responsibility* (CSR) belum memadai.
- 6) Penambahan anggaran serta realisasi belanja langsung urusan dan belanja langsung penunjang urusan tahun 2018 pada pemerintah kota Bekasi tidak didasarkan pada peraturan daerah mengenai perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi yang menjelaskan bahwa pada TA 2018 menyajikan Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp115,21 miliar, yang dalam realisasinya terdapat pembayaran yang tidak sesuai fakta dan berakibat kelebihan pembayaran sebesar Rp3,58 miliar. Atas kelebihan pembayaran tersebut telah dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp3,58 miliar.

Ketidakseimbangan pendapatan dan belanja Tahun Anggaran 2018 tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Koreksi Silpa Tahun Anggaran 2017 Pada APBD Tahun Anggaran 2018 Silpa dianggarkan sebesar Rp550.000.000.000,00 sedangkan saldo Kas per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp306.532.367.874,93 sehingga Silpa terkoreksi sebesar Rp243.467.632.125,07.
2. Alokasi belanja kegiatan luncuran APBD Tahun Anggaran 2017 Setelah dilakukan tutup buku pada tanggal 31 Desember 2018, terdapat beberapa kegiatan yang dananya bersumber dari dana transfer specific grant yang tidak diserap dan wajib dianggarkan kembali serta kekurangan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp189.608.096.495,00.
3. Persentase capaian target realisasi Pendapatan Asli Daerah yang tidak mencapai 100% yaitu terealisasi 80,26% dari target PAD Rp2.493.212.141.337,00 atau tercapai sebesar Rp2.001.150.459.194,21.

4. Hasil evaluasi terhadap belanja, terdapat kewajiban Pemerintah Daerah yang belum cukup dianggarkan pada APBD (murni) TA 2018 sebesar Rp371.002.767.650,00.

Karenanya sebagai upaya dalam mempertahankan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kota Bekasi melakukan analisis *going concern* guna memberikan gambaran atas kemampuan Pemerintah Kota Bekasi dalam mempertahankan keberlangsungan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan memenuhi kewajiban pembayaran utang atas penundaan pembayaran atas belanja langsung pada SKPD Tahun Anggaran 2018.

Sistem pengawasan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih kurang efektif dan efisien yang menyebabkan terjadinya beberapa penyimpangan yang menyebabkan belasan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi diberhentikan secara tidak hormat sejak 1 Maret lalu. Dilansir dari (megaindonesia.com News) Pemecatan tersebut menyusul adanya putusan hukum yang menyatakan mereka tersandung masalah korupsi. Berdasarkan data yang diperoleh, belasan ASN tersebut antara lain, Kepala Bagian Tata Usaha Heri Suparjan; Camat Bantargebang, Nurtani; Staff Ahli di bagian Setda Kota Bekasi, Roro Yoewati; Sekretaris Lurah Jatirasa, Timur Malaka; Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Heri Ismiraldi; Staff pada bagian Setda Kota Bekasi, Masna BA; Staff Setda Kota Bekasi, Rusdi; Anggota Satpol PP, Mita Susilawati, Anggota Satpol PP, Toni Hermanto; Tenaga Pengajar Sekolah Dasar, Herman; Staff di bagian Setda Kota Bekasi, Agus Sofyan, staff Disnaker In dan pegawai pelaksana di Kelurahan Jati Rasa, Linan. Dengan total ada sekitar 13 orang pegawai.

Fenomena tersebut menunjukan bahwa selama ini pemerintah Kota Bekasi belum menerapkan pengawasan khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah secara optimal dan belum menerapkan pengawasan khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah secara optimal dan belum maksimal menerapkan prinsip good governance pada kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan.

Penelitian sejenis ini pernah dilakukan oleh Umar et al., (2018) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh

dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja instansi para auditor pada Kantor Inspektorat Aceh. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa akuntabilitas dan transparansi yang dimiliki oleh auditor akan memberikan pengaruh nyata dalam meningkatkan kinerja instansi bagi auditor Kantor Inspektorat Aceh.

Penelitian dari Benawan et al., (2018) menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Perhubungan Kota Kepulauan Tidore dan transparansi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Dinas Kota Pekerja Transportasi Kepulauan Tidore.

Penelitian dari I Putu & Ayu (2020) menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah tidak ada berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Klungkung, transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Klungkung, Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah di Pelayanan pada Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "**Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kota Bekasi)**"

1.2 □ Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah terdapat pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah kota Bekasi?
- 2) Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah kota Bekasi?
- 3) Apakah terdapat pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah kota Bekasi?

1.3 □ Tujuan Penelitian

Dengan perumusan masalah yang sudah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian dari penelitian yang peneliti lakukan adalah:

- 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah kota Bekasi
- 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah kota Bekasi
- 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah kota Bekasi

1.4 □ Manfaat Penelitian

Disamping tujuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

- 1) Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu-ilmu yang didapatkan selama di perkuliahan.

- 2) Bagi Pemerintah Daerah Kota Bekasi

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam bidang akuntansi sektor publik berkaitan dengan pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

- 3) Bagi Umum

Sebagai bahan masukan yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian yang sejenis.

1.5 □ Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada pengaruh empat variabel yang digunakan yaitu Pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja pada pemerintah kota Bekasi.

1.6 □ Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulis menggunakan sistematika yang merujuk kepada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu teori Pengawasan, akuntabilitas, transparansi, kinerja pemerintah, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian, hambatan penelitian dan implikasi manajerial penelitian.